

Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Steven Reinaldo Lois¹, Hansen Tiendry Suardi¹, Sany¹

¹Accounting Department, Petra Christian University, Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, Indonesia

*Corresponding author: Email: Sany@petra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan Ukuran KAP terhadap penyajian kembali laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Pengukuran karakteristik komite audit di proksikan dengan indikator independensi komite audit, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian komite audit, dan Ukuran KAP. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol. Sedangkan penyajian kembali laporan keuangan diukur menggunakan variabel *dummy*, di mana "1" jika perusahaan melakukan penyajian kembali dan "0" jika tidak. Sampel terdiri dari 77 *restatement firms* dan 77 perusahaan kontrol. Dari 77 sampel perusahaan tersebut terdapat 8 outliers sehingga setelah outliers dieliminasi total sampel akhir yang di analisis adalah 138 *observations* (69 *restatement firms* and 69 *non-restatement firms*). Data dianalisis dengan regresi logistik menggunakan software SPSS. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penyajian kembali laporan keuangan, sedangkan independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian komite audit, dan Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

Kata Kunci: Komite audit, Restatement, Agency theory, Kualitas audit

ABSTRACT

This study's objective is to look at the impact of audit committee characteristics and the size of the audit firm on the restatement of financial statements of financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016 to 2020. Measurement of audit committee characteristics is proxied by indicators of audit committee independence, audit committee size, number of audit committee meetings, audit committee expertise, and size of audit firm. This study uses firm size and firm performance as control variables. Meanwhile, the restatement of financial statements is measured using a *dummy* variable, where "1" if the company makes a restatement and "0" if not. The sample consists of 77 restatement firms and 77 control firms. There are 8 outliers among the 77 restatement firms, therefore once the outliers are removed, the total final sample studied is 138 observations (69 restatement firms and 69 non-restatement firms). Data were analyzed by logistic regression using SPSS software. According to the findings of this study, the size of the audit committee had a negative effect on the restatement of financial statements, while the independence of the audit committee, the number of audit committee meetings, the expertise of the audit committee, and the size of the audit firm did not have a negative effect on the restatement of the financial statements.

Keywords: Audit Committee, Audit Firm Size, Restatement

PENDAHULUAN

Peningkatan penyajian kembali laporan keuangan telah menarik perhatian publik dalam beberapa dekade belakangan ini karena menyebabkan kerugian yang besar. Salah satunya yang dilakukan Tesco PLC yang menyajikan kembali pendapatannya setelah melakukan *overstated* pendapatan mereka sehingga

meningkat hingga £250 miliar dalam setengah tahun. Skandal Enron merupakan contoh lain mengenai dampak dari *restatement* setelah Enron mengumumkan kerugian mencapai \$US 618 juta dalam laporan keuangan Q3. Setelah itu Enron menyatakan penyajian kembali pendapatan untuk beberapa tahun sebelumnya. *Restatement* yang dilakukan oleh Tesco PLC maupun Enron menyebabkan hilangnya

kepercayaan investor sehingga menyebabkan menurunnya saham di pasar ekuitas Amerika Serikat selama berbulan-bulan setelah pengungkapan Enron [1].

Penyajian kembali laporan keuangan juga dialami oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2018 PT. Garuda Indonesia, Tbk. telah melakukan penyajian kembali laporan keuangan dengan mencatat kerugian sebesar \$US 216,5 juta setelah sebelumnya mencatat keuntungan sebesar \$890,85 ribu [2]. Penyajian kembali laporan keuangan ini menyebabkan Garuda Indonesia mendapatkan sanksi beserta denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian keuangan, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas pelanggaran pelaporan keuangan yang tidak mengacu pada standar akuntansi yang berlaku..

Penyajian kembali telah menjadi perdebatan mengenai kualitas dari laporan keuangan yang telah disampaikan oleh perusahaan publik. Keputusan investasi investor bergantung pada tingkat kepercayaan mereka terhadap kualitas laporan keuangan [3]. Dari perspektif investor, penyajian kembali bukan hanya indikasi masalah pada laporan keuangan pada periode sebelumnya, tetapi juga menandakan masalah perusahaan dan manajemen yang akan datang [4]. Penyajian kembali merupakan pengakuan bahwa perusahaan telah melakukan kelalaian atau salah saji material dalam laporan keuangan mereka [5]. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa *good corporate governance* dapat menyebabkan menurunnya kemungkinan penyajian kembali [6]–[9].

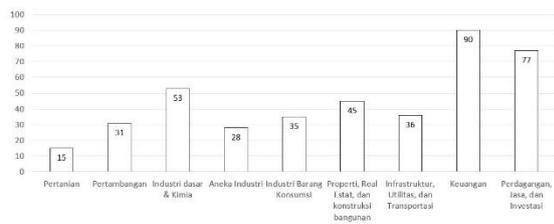
Dalam teori agensi, dijelaskan Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa pihak pemilik perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak manajemen dikarenakan pemisahan kepemilikan dan manajemen [10] sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Komite audit merupakan representasi dari mekanisme *corporate governance* yang berfungsi secara efektif untuk mengurangi konflik keagenan yang timbul dari terpisahnya kepemilikan dan manajemen [11], [12]. Berdasarkan POJK No 55/POJK.04/2015, “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam

membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris”. Pengawasan terhadap manajemen merupakan fungsi dari komite audit, dalam hal ini termasuk pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan untuk menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan. Beberapa skandal akuntansi telah memberikan pertanyaan tentang tanggung jawab dan peran komite audit dalam melakukan pengawasan laporan keuangan [14].

Penyajian kembali bukan hanya menggambarkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan oleh auditor [5]. Selain komite audit kualitas audit juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya penyajian kembali laporan keuangan. Kualitas audit dapat ditentukan oleh ukuran kantor auditor [15], [16]. Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu pihak auditor yang melakukan audit perusahaan juga dianggap memiliki peran penting dalam terjadinya penyajian kembali laporan keuangan. Penyajian kembali menyebabkan keraguan terhadap integritas KAP dalam memberikan opini audit. Dari berbagai kasus pada skandal laporan keuangan menunjukkan bahwa auditor KAP memiliki peran dalam membantu manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu auditor di KAP harus memiliki integritas agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Choi et al. (2010) berpendapat auditor KAP *big 4* dengan nama besarnya memiliki insentif untuk mempertahankan tingkat kualitas layanan di seluruh kantor dengan ukuran berbeda di setiap negara.

Hasil inkonsistensi pada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti berbagai sektor, negara, dan peraturan serta karakteristik komite audit yang berbeda antar negara memotivasi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik komite audit dan ukuran KAP terhadap penyajian kembali laporan keuangan pada perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Perusahaan di sektor keuangan dipilih karena menurut data perusahaan yang melakukan penyajian kembali di BEI untuk setiap sektor pada tahun 2015 didapatkan bahwa sektor keuangan yang paling banyak melakukan *restatement*. Data perusahaan yang melakukan *restatement* di BEI dapat dilihat pada figure 1.

Figure 1. Sektor perusahaan yang melakukan restatement pada tahun



2015 di Indonesia

KAJIAN TEORITIS

Agency Theory

Dalam *agency theory*, hubungan agensi didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau lebih pemilik perusahaan dengan manajemen yang melakukan pengelolaan perusahaan atas nama pemilik dengan memberikan delegasi dalam pengambilan keputusan kepada manajemen [12]. Pada dasarnya, pihak pemilik perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak manajemen dikarenakan pemisahan kepemilikan dan manajemen [10] yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan (*agency problem*). Konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat muncul dikarenakan pemisahan pengurus dan pemilik perusahaan, agen yang memiliki tujuan yang berbeda dengan prinsipal, dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham [12], [17].

Untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan, dibutuhkan pihak yang memiliki fungsi *monitoring* dan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. *Monitoring* umumnya dilakukan oleh pihak independen yang tentunya akan menimbulkan *monitoring expenditures* atau *agency cost* [12]. Komite audit adalah salah satu komponen dari sistem *Corporate Governance* yang berfungsi untuk meminimalisir adanya konflik keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajemen [11]. Dengan adanya aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh komite audit, maka akan mengurangi kemungkinan manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan akan meningkat [18].

Restatement

Terjadinya *Restatement* merupakan indikasi bahwa laporan keuangan yang

diterbitkan pada periode sebelumnya memiliki kualitas yang buruk [19]. Restatement dapat didefinisikan sebagai pengakuan bahwa perusahaan telah melakukan kelalaian atau salah saji material dalam laporan keuangan mereka [5]. Ada 4 kondisi di mana laporan keuangan yang telah diaudit disajikan kembali [20], yaitu: (1) salah saji material terjadi sebagai akibat dari beberapa tipe *inherent risk* (seperti praktik akuntansi manajemen yang agresif, penerapan *GAAP* yang salah, masalah personal, dan lainnya), (2) salah saji tidak dapat dihindari atau ditemukan oleh *internal control* perusahaan, (3) auditor eksternal gagal mendeteksi salah saji dalam penerbitan laporan keuangan, (4) salah saji terdeteksi setelah beberapa saat, jika signifikan perusahaan akan diminta untuk mengoreksi, menyatakan kembali, dan menerbitkan kembali laporan keuangan.

Karakteristik Komite Audit

Berdasarkan POJK No 55 /POJK.04/2015, “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris”. Komite audit memiliki tugas untuk mengawasi prosedur pelaporan keuangan dan menjamin bahwa laporan keuangan akurat [21]. Beberapa literatur mengidentifikasi bahwa komite audit memiliki beberapa karakteristik dalam menjalankan fungsinya, yaitu *Audit Committee Size, Independence, Meeting*, dan *Expertise*.

Independensi Komite Audit

Untuk menjalankan fungsinya, komite audit haruslah merupakan seorang yang independen dalam manajemen perusahaan. independensi sangat penting bagi komite audit agar dapat mencapai objektivitas tanpa ada gangguan dari pihak lain. Komite audit disebut independen jika tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dapat mengintervensi independensi mereka kepada manajemen dan perusahaan [22]

Dalam POJK No 55 /POJK.04/2015 dijelaskan mengenai independensi komite audit di mana “anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam (6) bulan terakhir, tidak mempunyai afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik”.

Dengan adanya independensi, maka akan menjamin objektivitas dari komite audit. Semakin independen suatu komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan dalam pelaporan keuangan dikarenakan komite audit tidak dipengaruhi oleh manajemen [7]. Independensi dalam komite audit mencakup dua aspek, yaitu jumlah anggota diluar perusahaan yang tidak terkait dan apakah anggota berpartisipasi dalam rencana opsi saham perusahaan [23].

Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah total anggota komite audit yang dipilih oleh dewan komisaris. Jumlah dari komite audit digunakan sebagai indikasi tersedianya sumber daya dalam komite audit [24]. Berdasarkan POJK No 55 /POJK.04/2015, “komite audit diwajibkan memiliki minimal 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan juga pihak luar perusahaan”.

Peningkatan jumlah komite audit dapat memberikan berbagai pandangan dan keahlian untuk memastikan pengawasan yang efektif sehingga meningkatkan kemungkinan komite audit untuk mendeteksi masalah yang muncul selama pelaporan keuangan [23]. Ukuran komite audit yang besar dapat menciptakan pengawasan yang efektif sehingga komite audit dapat mendorong manajemen dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan [25]. Hal ini dapat terjadi karena fakta bahwa dengan bertambahnya jumlah anggota komite audit, akan ada lebih banyak sumber daya dalam komite audit untuk meningkatkan kualitas pengawasan [26].

Rapat Komite Audit

Rapat komite audit adalah jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama satu tahun. Kualitas *monitoring* yang dilakukan oleh komite audit diproksikan dengan jumlah rapat yang diadakan. Tingginya jumlah rapat komite audit

menunjukkan tingkat pengawasan yang dilakukan [27]. Dengan melakukan rapat dengan *internal auditor*, komite audit akan mendapatkan informasi mengenai masalah akuntansi di perusahaan [28] sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian sebelumnya, jumlah rapat komite audit digunakan sebagai proksi dari *audit committee diligence* karena komite audit yang tidak aktif tidak mungkin melakukan pengawasan manajemen yang efektif [29]. Dalam POJK No 55 /POJK.04/2015 diatur jumlah rapat minimal yang harus dilakukan perusahaan publik di Indonesia, yaitu minimal empat kali dalam setahun.

Keahlian Komite Audit

Agar komite audit dapat menjalankan tugas pengawasan secara efektif, dibutuhkan anggota yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Keahlian yang dimaksud adalah anggota harus memiliki kemampuan, pengalaman, atau latar belakang di bidang keuangan dan akuntansi.

Di Indonesia, peraturan serupa diatur dalam POJK No 55 /POJK.04/2015 di mana “wajib memiliki paling sedikit satu (1) anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan”. Komite audit dengan keahlian dibidang keuangan memiliki hubungan yang lebih besar dengan *internal auditor* [30] sehingga meningkatkan komite audit untuk mendeteksi salah saji dan dapat dikoreksi tepat waktu [31].

Ukuran KAP

Audit memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan dan melindungi hak pemilik perusahaan dengan mengawasi tindakan manajemen [32]. Oleh karena itu, pemilik perusahaan membutuhkan bantuan pihak auditor yang menyediakan layanan audit. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material [33]. Ada dua peran seorang auditor, yaitu *the information role* dan *the insurance role* [34]. Dalam *information role*, auditor adalah orang yang secara independen memeriksa kebenaran laporan keuangan sebelum dipublikasikan. Dalam *insurance role*, auditor adalah orang yang bertanggung jawab atas kerugian pengguna laporan keuangan.

Auditor eksternal memiliki peranan penting dalam menciptakan kredibilitas laporan keuangan dengan menyediakan layanan independen kepada pemilik perusahaan mengenai integritas pelaporan [35]. Ukuran kantor audit merupakan faktor yang menentukan kualitas audit [15], [16]. Kantor *big 4* yang lebih besar dibandingkan kantor *non-big 4* memberikan pelayanan audit yang kualitasnya lebih tinggi dikarenakan pengalaman dan keahlian internal mereka yang lebih tinggi [16].

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Restatement*

Dalam teori agensi, perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* memberikan konflik keagenan. Konflik kepentingan terjadi karena setiap pihak cenderung melakukan hal yang menguntungkan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan pihak lain. Dibutuhkan pihak independen dengan fungsi pengawasan sehingga dapat menjadi penengah antara pemilik perusahaan dan manajemen. Komite audit sebagai representasi dari salah satu mekanisme *corporate governance* memiliki peran untuk meningkatkan kinerja perusahaan [36], [37] dan menjamin laporan keuangan [38] melalui pengawasan terhadap manajemen. Independensi komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit independen dapat meminimalisir konflik keagenan dalam teori agensi.

Penelitian terdahulu mendapati pentingnya independensi komite audit dalam menjaga integritas dan kualitas dari proses pelaporan laporan keuangan [39]–[41]. Komite audit yang terdiri dari direktur independen mampu menciptakan auditor independen yang kuat dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan [6], [42]. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement* [6], [7], [43] yang berarti semakin tinggi independensi komite audit dalam sebuah perusahaan, semakin rendah kemungkinan terjadinya *restatement*.

Penelitian terdahulu mendapatkan hasil di mana independensi komite audit tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terjadinya *earnings*

restatement [24]. Penelitian lainnya juga mendapatkan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba [44]. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis pertama pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement*

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Restatement*

Peningkatan jumlah komite audit dapat memberikan berbagai pandangan dan keahlian untuk memastikan pengawasan yang efektif sehingga meningkatkan kemungkinan komite audit untuk mendeteksi masalah yang muncul selama pelaporan keuangan [23]. Dengan adanya penambahan dalam komite audit, maka semakin banyak sumber daya yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang berbeda-beda sehingga dapat mengisi kekurangan antar anggota. Ukuran komite audit yang besar diharapkan mampu Pengawasan yang efektif merupakan fungsi utama komite audit dalam meminimalisir konflik keagenan dalam teori agensi. Pengawasan yang dilakukan komite audit akan menjamin integritas dan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen sehingga dapat mencegah terjadinya penyajian kembali dikemudian hari. Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya *earnings restatement* [24]. Hasil serupa ditemukan pada penelitian lainnya di mana ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan [27]

Akan tetapi beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil sebaliknya [45]. Penelitian lainnya juga mendapatkan hasil di mana ukuran komite audit tidak memiliki hubungan dengan terjadinya *restatement* [6]. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement*

Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Restatement*

Dalam *agency theory*, pengawasan merupakan salah satu hal yang terpenting untuk meminimalisir konflik keagenan. Intensitas rapat komite audit yang tinggi

merepresentasikan tingkat pengawasan yang dilakukan [27]. Jumlah rapat komite audit diasumsikan meningkatkan efektivitas pengawasan [46], [47]. Komite audit meningkatkan jumlah rapat ketika ada masalah yang signifikan dalam pengawasan atau kontrol [48]. Peningkatan efektivitas pengawasan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dapat membantu perusahaan menghindari insiden terjadinya *restatement*. Penelitian menemukan bahwa komite audit dengan minimal rapat empat (4) kali pertahun memiliki biaya audit yang lebih tinggi [49], di mana biaya ini menggambarkan *agency cost*.

Komite audit perusahaan yang mengalami masalah kecurangan dalam laporan keuangannya memiliki jumlah rapat yang lebih sedikit dibanding perusahaan yang tidak mengalami masalah dalam laporan keuangannya [50], [51]. Penelitian terdahulu menemukan hasil di mana audit komite pada perusahaan yang melakukan *restatement* tidak melakukan rapat minimal empat kali dalam setahun [6]. Penelitian lainnya mendapatkan hasil di mana jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan [27].

Beberapa penelitian lain menemukan hasil yang inkonsisten di mana tingkat *diligence* yang diukur menggunakan frekuensi rapat terhadap insiden terjadinya *restatement* mendapatkan hasil tingkat *diligence* komite audit tidak memiliki hubungan dengan insiden *restatement* [24], [43]. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement*

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Restatement*

Komite audit memiliki peran untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan pengawasan audit [21]. Agar peran ini dapat diselesaikan dengan baik, dibutuhkan seseorang dengan keahlian dan pengalaman keuangan yang luas [23]. Perusahaan dapat meningkatkan pengawasannya dengan mengangkat ketua komite audit dengan keahlian akuntansi [25]. Hal ini dapat mengurangi masalah keagenan dalam teori agensi di mana pengawasan oleh komite audit yang memiliki pengalaman dan

pengetahuan dapat meningkatkan pengawasannya sehingga membatasi kekuasaan manajemen atas penyusunan laporan keuangan [52].

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara keahlian keuangan dan kualitas laporan keuangan [25], [53]. Hasil dari beberapa penelitian mendapatkan hasil komite audit dengan keahlian keuangan memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan [6], [54]. Berdasarkan perkembangan hasil positif yang didapat penelitian tersebut, beberapa literatur secara khusus menguji pengaruh keahlian akuntansi dan audit komite audit terhadap kualitas laporan keuangan yang dapat mengarah pada terjadinya *restatement* [53], [55]. Penelitian lainnya yang meneliti keahlian akuntansi dan keuangan juga menemukan hasil yang serupa dengan penelitian sebelumnya [56], [57].

Namun penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil sebaliknya di mana anggota komite audit dengan keahlian keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial restatement* [24], [56]. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disimpulkan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement*

Pengaruh Ukuran KAP Terhadap *Restatement*

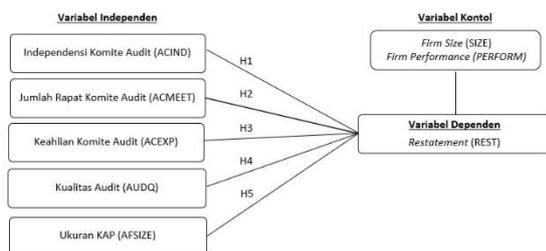
Selain karakteristik komite audit, auditor juga memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya konflik keagenan. Auditor eksternal mampu meningkatkan integritas laporan keuangan [58] sehingga dapat meminimalisir terjadinya *restatement*. Pengawasan auditor dengan kualitas dan layanan yang baik diberikan oleh KAP *big 4* tentu akan membebaskan sejumlah biaya yang lebih besar dibandingkan kantor yang lebih kecil. Sejalan dengan *agency theory* di mana untuk mengatasi konflik keagenan, dibutuhkan *agency cost* berupa biaya auditor.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* diperlakukan lebih konservatif. Oleh karena itu perusahaan yang diaudit oleh *big 4* akan memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi [59]. Selain itu, KAP *big 4* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan kantor yang lebih kecil

dikarenakan pengalaman yang lebih tinggi [16]. Pada beberapa penelitian didapatkan hasil yang konsisten di mana ukuran KAP memiliki pengaruh negatif dengan terjadinya *restatement* [60]–[62]. Namun penelitian sebelumnya menemukan hasil sebaliknya di mana ukuran KAP tidak memiliki hubungan terhadap *financial restatement* [63]. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement*

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Model Analisis

Berdasarkan model analisis di atas, maka persamaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REST}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{ACIND}_{i,(t-1)} + \beta_2 \text{ACSIZE}_{i,(t-1)} + \beta_3 \text{ACMEET}_{i,(t-1)} + \beta_4 \text{ACEXP}_{i,(t-1)} + \beta_5 \text{AFSIZE}_{i,(t-1)} + \beta_6 \text{SIZE}_{i,(t-1)} + \beta_7 \text{PERFORM}_{i,(t-1)} + e$$

Keterangan:

REST	=	<i>restatement</i>
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
ACIND	=	Independensi komite audit
ACSIZE	=	Ukuran komite audit
ACMEET	=	Jumlah rapat komite audit
ACEXP	=	Keahlian komite audit
AFSIZE	=	Ukuran KAP
SIZE	=	Ukuran perusahaan
PERFORM	=	Kinerja Perusahaan
e	=	<i>error term</i>
i	=	Perusahaan i
t	=	Periode t
$t-1$	=	1 tahun sebelum periode

Penyajian kembali laporan keuangan (REST) diproksikan menggunakan variabel *dummy*, di mana nilai “1” untuk perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan, dan nilai “0” untuk perusahaan yang tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Kriteria perusahaan yang melakukan *restatement* sesuai dengan kriteria *GAO’s definition of restatement* [64].

Independensi komite audit (ACIND) diukur menggunakan proporsi antara anggota komite audit independen dengan jumlah total komite audit. Kriteria independensi komite audit sesuai dengan 2 aspek independensi menurut [23]. Ukuran komite audit (ACSIZE) diukur dari jumlah anggota komite audit. Jumlah rapat (ACMEET) komite audit diukur dari jumlah rapat komite audit selama satu tahun. Keahlian komite audit (ACEXP) diukur dari jumlah komite audit yang memiliki keahlian akuntansi & keuangan. Kualitas audit (AUDQ) diproksikan menggunakan variabel *dummy* di mana diberi kode “1” untuk auditor *big 4*, dan kode “0” untuk auditor *non-big 4*. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur menggunakan logaritma natural total aset perusahaan. Kinerja perusahaan (PERFORM) diukur dengan menggunakan proksi rasio *Return on Asset (ROA)*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif di mana jenis data dalam penelitian ini dapat diukur dengan angka. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Laporan tahunan didapat dari *website* resmi dari masing-masing perusahaan maupun *website* resmi BEI. Pencarian perusahaan yang melakukan penyajian kembali dapat dilihat pada *annual report* dengan mencari kata kunci penyajian kembali, *restate*, *reclassification*, *restatement* pada bagian catatan atas laporan keuangan. Instrumen dan pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara melakukan pengumpulan laporan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2016 hingga 2020.

Populasi menggunakan perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total populasi 94 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria: Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020, Perusahaan menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan di *website* resmi perusahaan atau *website* resmi BEI, yaitu www.idx.co.id, Perusahaan

memiliki data keuangan lengkap yang berhubungan dengan penelitian dan data mengenai karakteristik komite audit perusahaan, serta data KAP auditor. Data tersebut diambil dari laporan tahunan perusahaan pada tahun sebelumnya (t-1), Perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan, Perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai sampel kontrol berdasarkan ukuran perusahaan dan tahun yang sama. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Restatement (n:69)				Tidak Restatement (n:69)				Diff. In Means
	Mean	Min	Max	Std. Deviation	Mean	Min	Max	Std. Deviation	
ACIND	0,71	0,50	0,83	0,07	0,68	0	0,86	0,11	0,03
ACSIZE	3,68	2	6	0,993	3,51	2	7	1,009	0,17
ACMEET	9,13	3	32	6,102	9,80	2	32	6,324	-0,67
ACEXP	2,58	1	5	1,035	2,09	1	5	0,781	0,49
SIZE	30,30	26,43	34,80	2,11	30,04	26,61	34,72	2,07	0,26
PERFORM	0,01	-0,27	0,11	0,05	0,02	-0,17	0,11	0,04	-0,01

Hasil dari analisis deskriptif untuk perusahaan *restatement* dan perusahaan kontrol dapat dilihat pada tabel 1. Independensi komite audit (ACIND) perusahaan yang melakukan *restatement* memiliki rata-rata 0,71 (71%) sedangkan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* memiliki rata-rata yang lebih rendah yaitu 0,68 (68%). Ukuran komite audit (ACSIZE) memiliki nilai rata-rata 3,68 pada perusahaan yang melakukan *restatement* dan 3,51 pada perusahaan tidak melakukan *restatement*. Variabel jumlah rapat komite audit (ACMEET) memiliki nilai rata-rata sebesar 9,13 untuk perusahaan yang melakukan *restatement* dan rata-rata sebesar 9,80 untuk perusahaan yang tidak melakukan *restatement*.

Keahlian komite audit (ACEXP) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,58 untuk perusahaan yang melakukan *restatement*, sedangkan nilai rata-rata sebesar 2,09. Artinya baik perusahaan yang melakukan *restatement* maupun tidak *restatement* memiliki rata-rata anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan 2 orang. Ukuran perusahaan (SIZE) yang

diukur menggunakan logaritma natural dari total aset memiliki nilai rata-rata untuk perusahaan yang melakukan *restatement* sebesar 30,30. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan *restatement* didapatkan nilai rata-rata sebesar 30,04. Kinerja perusahaan (PERFORM) yang diproksikan menggunakan ROA untuk perusahaan yang melakukan *restatement* memiliki rata-rata sebesar 0,01 dan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* memiliki rata-rata 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *restatement* mendapatkan *return* rata-rata sebesar 1% dari total aset yang dimiliki, lebih rendah dibandingkan rata-rata perusahaan yang tidak melakukan *restatement*, yaitu 2% *return* dari total aset.

Tabel 2. Statistik Deskriptif untuk Ukuran KAP

Variabel	Big 4	Non-big 4	Total
<i>Restatement</i>	39	30	69
<i>Non-restatement</i>	38	31	69
Total	77	61	

Pada tabel 2 dapat dilihat dari 138 sampel terdapat 77 perusahaan yang menggunakan auditor dari KAP *Big 4*, sedangkan 61 perusahaan lainnya menggunakan auditor *Non-big 4*. Dari 69 perusahaan yang melakukan *restatement*, didapatkan 39 perusahaan yang menggunakan auditor *Big 4*, sedangkan 30 perusahaan lainnya menggunakan auditor *Non-big 4*. Untuk 69 perusahaan yang tidak melakukan *restatement*, 38 perusahaan menggunakan auditor *Big 4* sedangkan 31 perusahaan lainnya menggunakan auditor *Non-big 4*.

Tabel 3. Koefisien Regresi Logistik

Variabel	B	S.E.	Wald	d f	Sig.	Exp(B)
ACIND	4,268	4,673	0,834	1	0,361	71,354
ACSIZE	-1,124	0,5	5,048	1	0,025	0,325
ACMEET	-0,062	0,039	2,556	1	0,11	0,939
ACEXP	1,534	0,447	11,77	1	0,001	4,635
AFSIZE	0,093	0,426	0,047	1	0,828	1,097
SIZE	0,066	0,125	0,283	1	0,595	1,069
PERFORM	-5,614	4,226	1,765	1	0,184	0,004
Constant	-3,92	4,052	0,936	1	0,333	0,02
Nagelkerke R Squared			20,7%			
Hosmer and Lemeshow test			0,063			

Hasil dari analisis regresi logistik dapat dilihat pada 3. Pada hasil pengujian Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit didapatkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,063. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu untuk

memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Hasil Nagelkerke's R Square menunjukkan nilai sebesar 20,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 20,7%, sedangkan 79,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Berdasarkan tabel 3, didapatkan hasil independensi komite audit memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan sehingga H1 ditolak. Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan dapat diminimalisir dengan adanya pihak independen yang memiliki fungsi pengawasan. Akan tetapi hasil penelitian ini menemukan bahwa komite audit independen selaku pihak yang mengawasi aktivitas manajemen tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap restatement. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia [7], [24] dan di Nigeria [57] di mana independensi komite audit tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap financial restatement. Penjelasan yang mungkin dapat menyebabkan pengaruh yang tidak signifikan ini dikarenakan hampir semua perusahaan di Indonesia telah menerapkan POJK No 55 /POJK.04/2015 di mana "anggota komite audit diwajibkan berasal dari luar perusahaan" (independen). Oleh karena itu, hasil analisis untuk independensi komite audit menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena hampir semua sampel perusahaan memiliki komite audit independen.

Ukuran komite audit memiliki nilai sig sebesar 0,025 yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dan koefisien bernilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap restatement sehingga H2 diterima. Sejalan dengan teori agensi di mana ukuran komite audit yang besar diharapkan mampu Pengawasan yang efektif merupakan fungsi utama komite audit dalam meminimalisir konflik keagenan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya di mana ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap restatement [24], [27].

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki nilai

koefisien -0,062 dengan nilai sig sebesar 0,110. Dengan demikian, jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap restatement sehingga H3 ditolak. Dalam teori agensi, pengawasan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan. Tingginya intensitas rapat komite audit merepresentasikan tingkat pengawasan yang dilakukan [27]. Akan tetapi hasil penelitian ini mendapatkan hasil sebaliknya di mana semakin banyak jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap restatement. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia [24] dan di Australia [43] yang mendapatkan hasil di mana jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap restatement. Hasil yang tidak signifikan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit meningkatkan jumlah rapat ketika ada masalah yang signifikan dalam pengawasan atau internal control perusahaan [48].

Pada tabel 3 didapatkan hasil keahlian komite audit memiliki nilai koefisien 1,534 sedangkan nilai sig sebesar 0,001. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keahlian komite memiliki pengaruh positif signifikan terhadap restatement sehingga H4 ditolak. Dalam teori agensi, pengawasan oleh komite audit yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dapat meningkatkan pengawasannya sehingga membatasi kekuasaan manajemen atas penyusunan laporan keuangan [52] sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut. Hasil pada penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia [24], [63] yang menemukan bahwa keahlian komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap restatement. Penelitian yang dilakukan di Malaysia menjelaskan hasil yang tidak signifikan dikarenakan peraturan MLMR paragraf 15.09(1) yang mengharuskan komite audit terdiri dari minimal satu (1) anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan [63]. Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena hampir semua sampel perusahaan memiliki 1 hingga 2 anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan. Sejalan dengan

penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan keahlian komite audit (ACEXP) memiliki rata-rata 2,58 untuk perusahaan yang melakukan restatement, dan 2,09 untuk perusahaan yang tidak melakukan restatement. Hal ini berarti semua perusahaan dalam sampel penelitian telah menerapkan POJK No 55/POJK.04/2015 di mana “anggota komite audit diwajibkan memiliki paling sedikit satu (1) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan”.

Untuk variabel ukuran KAP memiliki nilai koefisien 0,093 dengan nilai sig sebesar 0,828. Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif dan tidak signifikan sehingga H5 ditolak. Auditor dari KAP memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya konflik keagenan. Auditor eksternal mampu meningkatkan integritas laporan keuangan [58]. Namun hasil penelitian ini mendapatkan hasil sebaliknya di mana ukuran KAP yang diprosikan menggunakan auditor Big 4 dan Non-big 4 tidak memiliki pengaruh negatif terhadap restatement. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menemukan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh negatif terhadap restatement pada perusahaan di Malaysia [63]. Hal ini mungkin disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk membuat kinerja keuangan lebih baik di mata investor [63].

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan: 1) H1 ditolak yang berarti keberadaan anggota komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *restatement*. 2) H2 diterima yang berarti semakin tinggi ukuran komite audit maka akan menurunkan kemungkinan terjadinya *restatement*. 3) H3 ditolak yang berarti jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *restatement*. 4) H4 ditolak, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi jumlah komite audit dengan keahlian akuntansi maupun keuangan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya *restatement*. 5) H5 ditolak yang berarti ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *restatement*.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas didapatkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *restatement* yang berarti semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *restatement*. Oleh karena saran untuk perusahaan apabila ingin mengurangi kemungkinan terjadinya *restatement* pada laporan keuangannya dapat memperhatikan salah satu faktor signifikan yang dapat mempengaruhi *restatement*, yaitu meningkatkan jumlah dari komite auditnya sehingga semakin banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengawasi aktivitas manajemen. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah Peneliti dapat menambahkan karakteristik komite audit lainnya seperti *audit tenure*, dan variabel kontrol lainnya seperti *firm age*, *growth*, *leverage*, dan lainnya. Selain itu peneliti dapat melakukan penelitian dengan sampel dari negara lain yang memiliki perbedaan peraturan mengenai *corporate governance* khususnya komite audit.

Keterbatasan penelitian ini di mana sampel yang diteliti hanya sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020. Selain itu untuk kriteria keahlian komite audit, penelitian ini menggunakan kriteria Badolato et al. (2014) yang hanya terdiri dari pengalaman kerja komite audit dibidang akuntansi atau keuangan. Penelitian ini juga hanya menguji pengaruh dari auditor KAP yang melakukan audit pada periode $t-1$ dari penyajian kembali laporan keuangan perusahaan dan tidak memperhatikan pengaruh dari pergantian auditor sebelumnya apabila perusahaan melakukan pergantian auditor pada periode $t-2$.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sridharan, U. V., Caines, W. R., McMillan, J., & Summers, S. (2002). Financial statement transparency and auditor responsibility: Enron and Andersen. *International Journal of Auditing*, 6(3), 277–286. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2002.tb00018.x>
- [2] Gideon, A. (2019, July 29). Laporan keuangan direvisi jadi rugi, saham Garuda turun 1,5 persen. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/saham/read/>

- 4022238/laporan-keuangan-direvisi-jadi-rugi-saham-garuda-turun-15-persen
- [3] Romanus, R. N., Maher, J. J., & Fleming, D. M. (2008). Auditor industry specialization, auditor changes, and accounting restatements. *Accounting Horizons*, 22(4), 389–413. <https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.4.389>
- [4] Akhigbe, A., Kudla, R. J., & Madura, J. (2005). Why are some corporate earnings restatements more damaging? *Applied Financial Economics*, 15(5), 327–336. <https://doi.org/10.1080/0960310042000338722>
- [5] Palmrose, Z.-V., & Scholz, S. (2004). The circumstances and legal consequences of non-GAAP reporting: Evidence from restatements. *Contemporary Accounting Research*, 21(1), 139–180. <https://doi.org/10.1506/WBF9-Y69X-L4DX-JMV1>
- [6] Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004). Audit committee characteristics and restatements. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 23(1), 69–87. <https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.1.69>
- [7] Abdullah, S. N., Yusof, N. Z. M., & Nor, M. N. M. (2010). Financial restatements and corporate governance among Malaysian listed companies. *Managerial Auditing Journal*, 25(6), 526–552. <https://doi.org/10.1108/02686901011054854>
- [8] Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. *The Journal of Law and Economics*, 48(2), 371–406. <https://doi.org/10.1086/430808>
- [9] Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71(4), 443–465. <https://doi.org/10.2469/dig.v27.n2.79>
- [10] Bonazzi, L., & Islam, S. M. N. (2007). Agency theory and corporate governance: A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. *Journal of Modelling in Management*, 2(1), 7–23. <https://doi.org/10.1108/17465660710733022>
- [11] Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 19(2), 47–66. <https://doi.org/10.2308/aud.2000.19.2.47>
- [12] Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- [13] POJK No 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, 1 (2015).
- [14] Srinivasan, S. (2005). Consequences of financial reporting failure for outside directors: Evidence from accounting restatements and audit committee members. *Journal of Accounting Research*, 43(2), 291–334. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2005.00172.x>
- [15] Choi, J.-H., Kim, F., Kim, J.-B., & Zang, Y. (2010). Audit office size, audit quality and audit pricing. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 29(1), 1–40.
- [16] Francis, J. R., & Yu, M. D. (2009). Big 4 office size and audit quality. *The Accounting Review*, 84(5), 1521–1552. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.5.1521>
- [17] Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law & Economics*, 26(2), 301–325.
- [18] Bajra, U., & Čadež, S. (2017). Audit committees and financial reporting quality: The 8th EU Company Law Directive perspective. *Economic Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.03.002>
- [19] General Accounting Office (GAO). (2002). *Financial statement restatements: Trends, market impacts, regulatory responses, and remaining challenges* (p. GAO-03-138).
- [20] Eilifsen, A., & Messier, W. F. (2000). The incidence and detection of misstatements: A review and

- integration of ar... *Journal of Accounting Literature*, 19, 1–43.
- [21] Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Neal, T. L. (2009). The audit committee oversight process. *Contemporary Accounting Research*, 26(1), 65–122. <https://doi.org/10.1506/car.26.1.3>
- [22] Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. (1999). Report and recommendations of the the Blue Ribbon Committee on improving of corporate audit committees effectiveness. *The Business Lawyer*, 54(3), 1067–1095.
- [23] Be´dard, J., Chtourou, S. M., & Courteau, L. (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 23(2), 13–35. <https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.2.13>
- [24] Lin, J. W., Li, J. F., & Yang, J. S. (2006). The effect of audit committee performance on earnings quality. *Managerial Auditing Journal*, 21(9), 921–933. <https://doi.org/10.1108/02686900610705019>
- [25] DeFond, M. L., & Francis, J. R. (2005). Audit research after Sarbanes-Oxley. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 24, 5–30. <https://doi.org/10.2308/aud.2005.24.s-1.5>
- [26] Jamil, N. N., & Nelson, S. P. (2011). An investigation on the audit committees effectiveness: The case for GLCs in Malaysia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 13(3), 287–305. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5484>
- [27] Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 147–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.08>
- [28] Scarbrough, D. P., Rama, D. V., & Raghunandan, K. (1998). Audit committee composition and interaction with internal auditing: Canadian evidence. *Accounting Horizons*, 12(1), 51–62.
- [29] Menon, K., & Deahl Williams, J. (1994). The use of audit committees for monitoring. *Journal of Accounting and Public Policy*, 13(2), 121–139. [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(94\)90016-7](https://doi.org/10.1016/0278-4254(94)90016-7)
- [30] Raghunandan, K., Rama, D. V., & Read, W. J. (2001). Audit Committee Composition, “Gray Directors,” and Interaction with Internal Auditing. *Accounting Horizons*, 15(2), 105–118.
- [31] DeZoort, F. T., & Salterio, S. E. (2001). The effects of corporate governance experience and financial-reporting and audit knowledge on audit committee members’ judgments. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 20(2), 31–47. <https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.2.31>
- [32] Newman, D. P., Patterson, E. R., & Smith, J. R. (2005). The role of auditing in investor protection. *The Accounting Review*, 80(1), 289–313. <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.1.289>
- [33] PCAOB. (2010). *Report on observations of PCAOB Inspectors related to audit risk areas affected by the economic crisis*. PCAOB Release No. 2010-006.
- [34] Mansi, S. A., Maxwell, W. F., & Miller, D. P. (2004). Does auditor quality and tenure matter to investors? Evidence from the bond market. *Journal of Accounting Research*, 42(4), 755–793. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2004.00156.x>
- [35] Jiang, H., Habib, A., & Zhou, D. (2015). Accounting restatements and audit quality in China. *Advances in Accounting*, 31(1), 125–135. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.03.014>
- [36] Anderson, K. L., & Yohn, T. L. (2002). The effect of 10K restatements on firm value, information asymmetries, and investors’ reliance on earnings. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.332380>
- [37] Davidson, W. N., Xie, B., & Xu, W. (2004). Market reaction to voluntary announcements of audit committee appointments: The effect of financial expertise. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23(4), 279–293. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.06.001>

- [38] Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33, 375–400. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(02\)00059-9](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(02)00059-9)
- [39] Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2000). Audit committee composition and auditor reporting. *The Accounting Review*, 75(4), 453–467.
- [40] Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1–36. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1996.tb00489.x>
- [41] DeFond, M. L., & Jiambalvo, J. (1991). Incidence and circumstances of accounting errors. *The Accounting Review*, 66(3), 643–655.
- [42] Beattie, V., Brandt, R., & Fearnley, S. (1999). Perceptions of auditor independence: U.K. evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 8(1), 67–107. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(99\)00005-1](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(99)00005-1)
- [43] Lary, A. M., & Taylor, D. W. (2012). Governance characteristics and role effectiveness of audit committees. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 336–354. <https://doi.org/10.1108/02686901211217969>
- [44] Amin, A. (2016). Independensi komite audit, kualitas audit dan kualitas laba: Bukti empiris perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 1–14.
- [45] Xie, B., Davidson, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*, 9(3), 295–316. [https://doi.org/10.1016/S0929-1199\(02\)00006-8](https://doi.org/10.1016/S0929-1199(02)00006-8)
- [46] P. Collier and A. Gregory, “Audit committee activity and agency costs,” *J. Account. Public Policy*, vol. 18, no. 4–5, pp. 311–332, Dec. 1999, doi: 10.1016/S0278-4254(99)00015-0.
- [47] Conger, J., Finegold, D., & Lawler, E. E. I. (1998). Appraising boardroom performance. *Harvard Business Review*, 76(1), 136–148.
- [48] Zhang, Y., Zhou, J., & Zhou, N. (2007). Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(3), 300–327. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.03.001>
- [49] Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley Jr., R. A. (2002). Board characteristics and audit fees. *Contemporary Accounting Research*, 19(3), 365–384. <https://doi.org/10.1506/CHWK-GMQ0-MLKE-K03V>
- [50] Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapidés, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. *Accounting Horizons*, 14(4), 441–454. <https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.4.441>
- [51] McMullen, D. A., & Raghunandan, K. (1996). Enhancing audit committee effectiveness. *Journal of Accountancy*, 182, 79–81.
- [52] Kalbers, L. P., & Fogarty, T. J. (1993). Audit committee effectiveness: An empirical investigation of the contribution of power. *A Journal of Practice & Theory*, 12(1), 24–49.
- [53] Dhaliwal, D., Naiker, V., & Navissi, F. (2010). The association between accruals quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on audit committees: Accruals quality and financial expertise. *Contemporary Accounting Research*, 27(3), 787–827. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01027.x>
- [54] Saleh, N. M., Iskandar, T. M., & Rahmat, M. M. (2007). Audit committee characteristics and earnings management: Evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 15(2), 147–163. <https://doi.org/10.1108/13217340710823369>
- [55] Goh, B. W. (2009). Audit committees, boards of directors, and remediation of material weaknesses in internal control. *Contemporary Accounting Research*, 26(2), 549–579. <https://doi.org/10.1506/car.26.2.9>

- [56] Baatwah, S. R., Ahmad, N., & Salleh, Z. (2018). Audit committee financial expertise and financial reporting timeliness in emerging market: Does audit committee chair matter? *Issues In Social And Environmental Accounting*, 10(4), 63–85. <https://doi.org/10.22164/isea.v10i4.164>
- [57] Kibiya, M. U., Che-Ahmad, A., & Amran, N. A. (2016). Audit committee independence, financial expertise, share ownership and financial reporting quality: Further evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7), 125–131.
- [58] Alzoubi, E. S. S. (2017). Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 30, 69–84. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2017.12.001>
- [59] Reynolds, J. K., & Francis, J. R. (2000). Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 30(3), 375–400. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00010-6](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00010-6)
- [60] Bloomfield, D., & Shackman, J. (2008). Non-audit service fees, auditor characteristics and earnings restatements. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 125–141. <https://doi.org/10.1108/02686900810839839>
- [61] Chen, K.-L., Chang, S.-H., & Wang, T.-S. (2016). Do personnel stability, family business and auditor influence. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(1), 245–251.
- [62] Francis, J. R., Michas, P. N., & Yu, M. D. (2013). Office size of big 4 auditors and client restatements. *Contemporary Accounting Research*, 30(4), 1626–1661. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12011>
- [63] Hasnan, S., Mohd Razali, M. H., & Mohamed Hussain, A. R. (2020). The effect of corporate governance and firm-specific characteristics on the incidence of financial restatement. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 244–267. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0103>
- [64] Government Accountability Office (GAO). (2006). Financial Restatements: Update of Public Company Trends, Market Impacts, and Regulatory Enforcement Activities. In *Washington, D.C.: Government Printing Office*.